



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BIRO UMUM
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME
DAN
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
BADAN PUSAT STATISTIK**

NOMOR : HK.02.00/01/2026

NOMOR : [REDACTED]

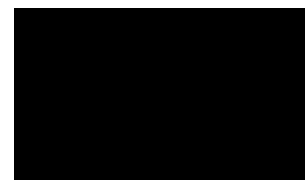
**TENTANG
PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA**

Pada hari Senin tanggal dua puluh enam bulan Januari tahun dua ribu dua puluh enam (26-01-2026), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

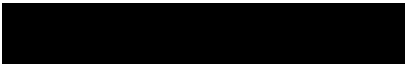
1. [REDACTED] : Kepala Biro Umum Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 161 Tahun 2025 tanggal 5 November 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia, berkedudukan di *Indonesia Peace and Security Center*, Jalan Anyar, Desa Tangkil,

Paraf pihak kedua:

Paraf pihak pertama:



Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, 16810, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2.  : Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Badan Pusat Statistik berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 0331005/KPG Tahun 2023 Tanggal 31 Maret 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pusat Pendidikan dan Pelatihan Badan Pusat Statistik, berkedudukan di Jalan Raya Jagakarsa Nomor 70, Lenteng Agung, Jakarta 12620, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

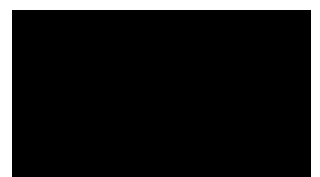
PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah unsur pendukung tugas dan fungsi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme yang mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga dan perlengkapan, pengelolaan barang milik negara, pengelolaan kepegawaian dan organisasi ketatalaksanaan, keuangan dan pelaksanaan tata usaha pimpinan, keprotokolan, serta pengamanan;
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah unsur pendukung tugas dan fungsi badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pusat Statistik melalui Sekretaris Utama, mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pengembangan sumber daya manusia di bidang statistik;
3. bahwa **PARA PIHAK** memiliki hubungan koordinasi yang dilaksanakan secara sinergi sebagai satu sistem pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sesuai tugas dan fungsi masing-masing

Paraf pihak kedua:

Paraf pihak pertama:



sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman tentang Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk sebagai landasan dalam melakukan kerja sama dalam penyelenggaraan pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk menjadi dasar dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. pertukaran data dan/atau informasi;
- b. pelaksanaan peningkatan sumber daya manusia; dan
- c. kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama dan/atau dokumen lain yang dilakukan oleh wakil-wakil yang ditunjuk oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Perjanjian Kerja Sama dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenang **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

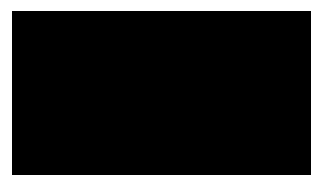
Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Paraf pihak kedua:

Paraf pihak pertama:



- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhiri Nota Kesepahaman ini.
- (4) Berakhirnya Nota Kesepahaman ini tidak menghapus hak dan kewajiban **PARA PIHAK** yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 5

BIAYA

Biaya yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** dan sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

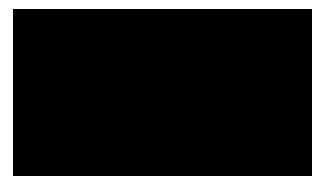
Pasal 6

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** baik secara sendiri maupun bersama-sama mengadakan pemantauan dan evaluasi terhadap Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau diadakan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam merencanakan program kerja sama selanjutnya.

Paraf pihak kedua:

Paraf pihak pertama:



Pasal 7
KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** wajib menjaga kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan data dan/atau informasi yang diperoleh berdasarkan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) **PARA PIHAK** hanya dapat menggunakan data dan/atau informasi sesuai dengan tujuan dan tugas **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) **PARA PIHAK** wajib menyebutkan sumber data dalam penggunaan data dan/atau informasi yang diperoleh dari **PARA PIHAK**.

Pasal 8
KORESPONDENSI

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk narahubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini yaitu:

a. PIHAK PERTAMA

Kepala Biro Umum

Alamat :

Telepon :

Email :

b. PIHAK KEDUA

Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan

Alamat :

Telepon :

E-mail :

- (2) Dalam hal terjadi perubahan narahubung dan/atau alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang mengalami perubahan wajib memberitahukan **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah terjadinya perubahan tersebut.

Paraf pihak kedua:

Paraf pihak pertama:

- (3) Selama pemberitahuan perubahan narahubung dan/atau alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka penyampaian informasi tetap ditujukan ke narahubung dan/atau alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Perubahan narahubung dan/atau alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan tanpa adendum terhadap Nota Kesepahaman ini.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.

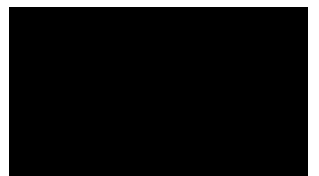
Pasal 10

ADENDUM

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini diatur dalam bentuk adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK**, dituangkan secara tertulis dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

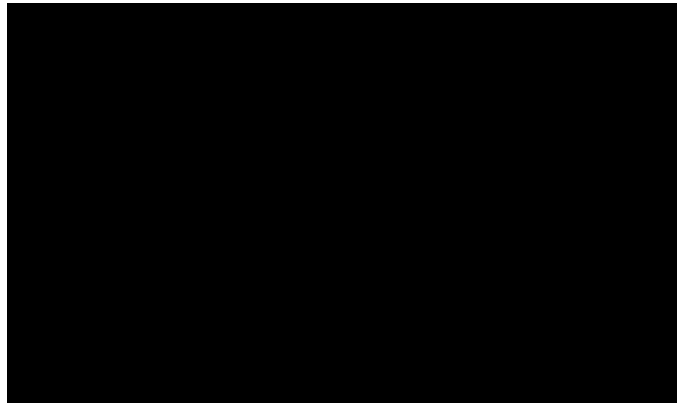
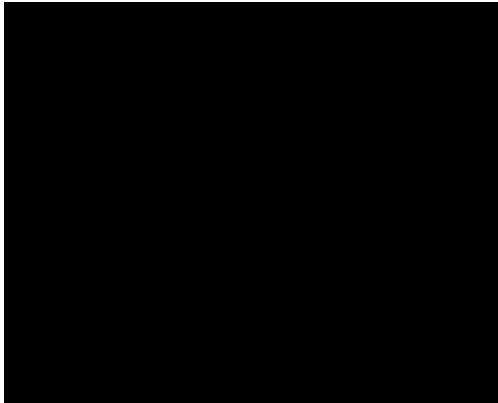
Paraf pihak kedua:

Paraf pihak pertama:



Pasal 11**PENUTUP**

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan, tahun, dan tempat sebagaimana tersebut pada awal Nota Kesepahaman ini yang dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup dan dibubuhi cap masing-masing **PIHAK**, memiliki kekuatan hukum yang sama dan **PARA PIHAK** memegang masing-masing 1 (satu) rangkap asli.



Paraf pihak kedua:

Paraf pihak pertama:

